

DAFTAR PUSTAKA

- Avalos, B. (2002). *Public Sector Transparency and Accountability*. Making It Happen. pp. 167-169.
- Depdiknas. (2003). *Pedoman Administrasi Sekolah Dasar*. Jakarta : Dirjen Dikdasmen Depdiknas. 2004. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Depdiknas dan Depag. (2006). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan Keuangan, Monitoring Dan Evaluasi*. Jakarta: Depdiknas & Depag.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Editor Abdul Halim. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harjono, Y. 2007. "Kepsek Bukan Lagi 'Penguasa' Tunggal." <http://www2.kompas.com/ver1/dikbud/0710/02/18474.htm>> 2 Oktober 2007 diakses 5 Juli 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2005. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jackson, P.M. (1982). *The Political Economy of Bureaucracy*. Oxford: Philip Allan Publishers Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Penerbit Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2002). "Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management." *Gadjah Mada International Journal of Business* September 2002 vol.4 no. 3. pp.373-395.
- (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulgan, R. (1997). "The Processes of Public Accountability." *Australian Journal of Public Administration* 56 (1) pp. 25-36.
- Mulyadi. (1993). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta.
- Noordiawan, D.; Iswandi Sondi Putra; & Maulida Rahmawati. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Bupati Banyumas. (2007). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah. (2005). Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Purnomo, S.H., 2005. "Mandulnya Komite Sekolah". <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/22/opi04.htm>> 22 Juli 2005 diakses tanggal 28 Juni 2008.
- Schiavo-Campo, S., and Daniel Tomasi. (1999). *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank, Manila.
- Santosa. (2005). "Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Banyumas". Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Sunaryanto, A. (2007). "Wajib Belajar Tak Sekadar Angka Partisipasi." <www.tempointeraktif.com> 8 Maret 2007 diakses tanggal 29 Mei 2008.
- Sutisna, A. (2004). "Amburadulnya Laporan Keuangan Sekolah." Diambil dari <<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/07/28/brk,20040728-29,id.html>>. Diakses tanggal 24 Mei 2008.
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi. Badan Penerbitan FE UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang. (2003). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- United National Development Programme (UNDP). (2004). Anti-Corruption Practice Note.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publications.